

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara masih terus berlangsung secara terus menerus. Untuk bisa memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan, negara mengharuskan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, efektif, ekonomis, dan tanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

Bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang SAP menggantikan (PP) No. 24/2005. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertera pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilakukan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun.

PP No. 71 /2010 mengharuskan instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Dalam PP No 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan

empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya implementasi akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Perubahan yang terlihat dengan penerapan SAP yang baru dengan standar sebelumnya SAP berbasis kas yaitu pada SAP berbasis kas pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana sementara untuk SAP yang baru yaitu menggunakan *Full Accrual Basis* yakni mengakui pengakuan transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan pelaporan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan perubahan standar ini diharapkan adanya perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai dari efisiensi dan efektivitas (baik pada aspek penganggaran, akuntansi, dan pelaporan). Disamping itu juga diharapkan adanya peningkatan pengendalian *fisikal*, manajemen asset, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Informasi sistem anggaran juga sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dalam pelaporan LKPD.

Masih terdapat pandangan banyak pihak yang kurang yakin dengan penerapan SAP berbasis akrual yang paling lambat harus diterapkan pada tahun 2015. Sejauh ini masih banyak kendala yang terjadi di dalam

pelaporan laporan keuangan daerah maupun pusat. Hal tersebut diperkuat dengan laporan audit BPK yang mana masih sedikit laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemerisaan LKPD pada 108 pemerintah daerah meliputi 7 Laporan Keuangan (LK) pemerintah provinsi, 88 LK pemerintah kabupaten, dan 13 LK pemerintah kota. Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 dan 9 Laporan keuangan badan lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan laba rugi atau laporan surplus defisit, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Terhadap 108 LKPD tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 52 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 2 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 47 LKPD. Adapun terhadap Laporan keuangan badan lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP Migas Tahun 2011 dan 2012, opini WDP untuk LK PDAM kota padang Tahun 2012 (www.bpk.go.id).

Rasono dalam Setyaningsih (2013) menyatakan bahwa beberapa kendala yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam LKPD dinyatakan kurang wajar yaitu kurangnya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mewujudkan pengelola keuangan daerah dan masalah disiplin anggaran. Kondisi penerapan SAP berbasis kas menuju akrual belum dapat berjalan baik, akuntansi berbasis

akrual harus mulai dilaksanakan sejak pertanggungjawaban APBN/ APBD tahun 2010.

Penelitian serupa tentang kesiapan aparatur pemerintah dalam menyikapi perubahan SAP berbasis akrual sudah dilakukan oleh Setyaningsih (2013). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang sifatnya eksploratif memberikan bukti empiris berupa pemahaman aparatur Pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

Hasil yang pertama yaitu tingkat pemahaman aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih rendah. Kedua, aparatur Kota Surakarta mampu berkerja secara mandiri dalam melaksanakan SAP ini, namun partisipasi menyatakan masih adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan, ketiga, kurangnya pengalaman, sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP, berdampak pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan kurang dipertimbangkan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sebelumnya jenis penelitiannya bersifat eksploratif kualitatif studi kasus Pemerintah Kota Surakarta, peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan aparatur Pemerintah Daerah Sleman dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menerapkan

Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (kasus Pemerintah Kabupaten Sleman)”

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang efektif dan efisien maka perlu didukung dengan kesiapan aparatur pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah maupun pusat. Peneliti ingin mengetahui sampai sejauh mana kesiapan Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akruaI dengan rumusan sebagai berikut

- a. Apakah tingkat pengalaman berpengaruh terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akruaI?
- b. Apakah komitmen berpengaruh terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akruaI?
- c. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akruaI?
- d. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akruaI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pengalaman terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis aktual.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis aktual.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh teknologi informasi terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis aktual.
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis aktual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

- Manfaat secara akademisi

Hasil dari penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi oleh para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan juga menberambah wawasan dalam menganalisis kesiapan aparatur pemda dalam penerapan SAP berbasis aktual.

- Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan kesiapan aparatur dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan penelitian selanjutnya.